



Pemkot Tetap Gunakan Sistem Kuota dalam PPDB

JOGJA-- Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Drs Syamsury mengatakan penerimaan peserta didik baru masuk SMP dan SMA Negeri di Jogja tetap menggunakan sistem *on line*. Penggunaan sistem ini lebih transparan, aktual dan tidak pandang bulu.

"Dengan menggunakan sistem ini juga dapat mengurangi kecurangan. Misal memang nilainya tidak baik, walaupun anak pejabat sekolah sekalipun pasti juga tidak dapat diterima," katanya dalam diskusi "Telaah Kritis Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Jogja", Sabtu (2/5) di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.

Syamsury --mewakili Wali Kota Jogja, Herry Zudianto yang berhalangan hadir-- menyampaikan tentang sistem kuota dalam prosesi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yakni peserta didik baru Kota Jogja mendapat jatah 70 persen, peserta didik baru penduduk luar kota Jogja dalam Provinsi DIY mendapat kuota 25 persen dan untuk peserta didik baru penduduk luar provinsi mendapat 5 persen.

"Pemilihan dengan sistem kuota ini juga untuk mengakomodir KMS (Kartu Menuju Sejahtera, yang menyatakan

siswa berasal dari keluarga tidak mampu, **red.**) yang masuk. Pemegang KMS yang berasal dari luar kota Jogja jauh lebih sedikit dibandingkan yang lain," katanya.

Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tentang kuota peserta didik baru masuk SMP dan SMA tak lain bertujuan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk kota Jogja untuk bersekolah di sekolah negeri dalam kota Jogja.

Menurutnya dari hasil pengalaman yang lalu, banyak anak yang berdomisili di kota yang tidak berkesempatan untuk sekolah di kota Jogja. Bahkan ada sekolah di kota yang hanya berisi 30 persen anak kota Jogja sebelum diberlakukan kebijakan ini.

Sementara itu Dewan Pendidikan Provinsi Drs KRT Wahyuntana menyarankan agar keputusan Wali Kota Jogja untuk kuota PPDB tahun 2009 segera diterbitkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Sedangkan Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana (UAJY) mengkritisi tiga hal akan adanya sistem kuota ini pertama dari presepektif upaya peningkatan kualitas akademik sekolah-sekolah di kota Jogja.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005